UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Reformulasi Peraturan Penyitaan Aset dengan Pendekatan Value-Based System Dalam Rangka Pemulihan
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
Sharon Shalom Sapan Putri, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

REFORMULASI PERATURAN PENYITAAN ASET DENGAN PENDEKATAN *VALUE-BASED SYSTEM* DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Sharon Shalom Sapan Putri[1], Sigid Riyanto[2]

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika normatif pengaturan penyitaan aset dalam hukum pidana Indonesia ditinjau dari aspek pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi serta merumuskan arah formulasi pengaturan penyitaan aset yang ideal dengan pendekatan *value-based system*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan 4 (empat) narasumber untuk dimintai pengetahuannya seputar topik Penulisan Hukum. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, penelitian ini mengidentifikasi problematika pengaturan penyitaan aset dalam KUHAP dan UU PTPK, problematika pengaturan pemblokiran dalam KUHAP, serta keterbatasan pengaturan *value-based system* dalam KUHAP, KUHP, UU PTPK, dan RUU PATP sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Kedua, reformulasi menuju *value-based system* perlu ditempuh melalui empat arah formulasi: pengakuan nilai manfaat kejahatan sebagai dasar penyitaan *untainted assets*, standarisasi mekanisme kuantifikasi nilai (*benefit assessment*), kewenangan penyitaan *substitute assets* sejak tahap penyidikan, dan reorientasi uang pengganti sebagai instrumen pemulihan nilai yang penuh dan imperatif.

Kata Kunci: Korupsi; Pemulihan Kerugian Keuangan Negara; Penyitaan Aset; *Value-Based System*; Aset Pengganti.

---

[1] Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

[2] Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Reformulasi Peraturan Penyitaan Aset dengan Pendekatan Value-Based System Dalam Rangka Pemulihan
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi
Sharon Shalom Sapan Putri, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

REFORMULATION OF ASSET SEIZURE REGULATIONS THROUGH A VALUE-BASED SYSTEM APPROACH IN THE CONTEXT OF STATE FINANCIAL LOSS RECOVERY FROM CORRUPTION

By: Sharon Shalom Sapan Putri[1], Sigid Riyanto[2]

ABSTRACT

This study aims to analyze the normative problems in the regulation of asset seizure within Indonesian criminal law from the perspective of state financial loss recovery resulting from corruption, and to formulate ideal and effective regulatory directions for asset seizure through a value-based system approach.

The research method used is normative legal research. The data used is secondary data obtained through literature study and interviews with 4 (four) resource persons to gain their insights on the topic of this Legal Writing. The approaches used are the statute approach, the conceptual approach, and the comparative approach.

The research yields two main findings. First, the study identifies three major issues concerning the regulation of asset seizure for the recovery of state financial losses resulting from corruption, namely the regulation of asset seizure under the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Anti-Corruption Law (UU PTPK), the regulation of asset freezing under the Criminal Procedure Code (KUHAP), and the limitations of the value-based system under the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Criminal Code (KUHP), the Anti-Corruption Law (UU PTPK), and the Asset Forfeiture Bill (RUU PATP). Second, the reformulation toward a value-based system should be pursued through four key directions: recognizing the value of criminal benefits as the basis for confiscating untainted assets, standardizing the mechanism for benefit assessment, authorizing the confiscation of substitute assets from the investigation stage onward, and reorienting compensation orders as a mandatory instrument for the full recovery of the value of state financial losses.

Keywords: Corruption; State Financial Loss Recovery; Asset Seizure; Value-Based System; Substitute Assets.

---

[1] *Undergraduate Student of Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada*
[2] *Lecturer of Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada*